

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*  
(Studi Empiris pada OPD Pemerintah Provinsi Riau)**

**Nuraini, Kirmizi & Kamaliah**

**Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau  
Email: nuraini@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The objective of the research was to examine and analyze the influence of good government governance, the application of government accounting standard, competency of human resources and utilization of information technology with government internal control system as moderating variable on the quality of financial of local government. The research use causality research method. The population was PPK-OPD (Financial Administrative Personal- Regional Device Organization), financial staff/Accounting staff, and treasurers in 35 OPDs in Riau Provincial Government. The samples were 105 personel, taken by using total sampling technique. The data were gathered by using questionnaires and analysis of data using SmartPLS. The result of the research showed that the application of accounting standard and utilization of information technology had positive and significant influence on the quality of financial reports of local government. Good government governance and competency of human resources are doesn't affect to quality of financial reports of local government. Government internal control system couldn't moderate the correlation of good government governance, the application of government accounting standards and utilization of information technology with the quality of financial reports of local government. Government internal control system as moderating variable could strengthen the correlation of competency of human resources to quality of local government financial reports of local government.*

**Keywords :** *Quality of financial statements, good government governance, accounting standards, human resources, information technology*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Penerapan *good government governance* merupakan tuntutan dari pembaharuan sistem keuangan. Tujuannya agar pengelolaan keuangan rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan dalam konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menerapkan pengembangan

kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SAP oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (Zeyn, 2011).

Keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang ber-kompeten, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan.

Selain sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sering terjadinya kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, dan kualitas laporan keuangan yang buruk salah satunya adalah lemahnya pengendalian internal (Mahmudi, 2011). Pentingnya pengendalian internal yang memadai dan komitmen organisasi yang sangat tinggi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *good government governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderating.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh *good government governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2) untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam memoderasi *good government governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## KAJIAN PUSTAKA

### **Agency Theory**

Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*).

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 4 (empat) karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Rasdiyanto, 2013).

### **Good Government Governance**

*Good government governance* merupakan penyelenggaraan tata pemerintahan secara solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, efektif dan efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, keterbukaan informasi dan perlakuan adil dalam seluruh bidang pemerintahan sehingga visi, misi dan tujuan pemerintahan serta tujuan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian Zeyn (2011), Azlim (2012) dan Yusniar (2016), menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. pelaksanaan *good government governance* harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good government governance* yang berlaku saat ini, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan keuangan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip *good government governance* juga tidak terlepas dari masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. kondisi ini mengakibatkan bahwa, *good government governance* merupakan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan sebagai pedoman agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan. Penerapan SAP secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Herawati dan Sinarwati (2014), menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Indriasari dkk, 2008).

### **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, menampilkan dan menyebarkan informasi (Darwanis dan Dwi, 2009).

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD yang meliputi Badan dan Dinas. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian penatausahaan keuangan/ akuntansi. Jenis data adalah data primer yaitu penyebaran kuesioner.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kualitas laporan keuangan dikembangkan dari Sudiaranti yang terdiri dari tujuh pertanyaan dengan skala likert 5 poin
2. *Good government governance* dikembangkan dari Sari dan Nur Arvah (2016) yang terdiri dari dua belas pertanyaan dengan skala likert 5 poin
3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dikembangkan dari Fikri (2015) yang terdiri dari sebelas pertanyaan dengan skala likert 5 poin
4. Kompetensi sumber daya manusia dikembangkan dari Sudiaranti (2015) yang terdiri dari tujuh pertanyaan dengan skala likert 5 poin
5. Pemanfaatan teknologi informasi dikembangkan dari Aryani (2013) dengan skala likert 5 poin

### Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan software *Partial Least Square* (PLS).

### Model pengukuran *Outer Model* atau *Measurement Model*

Pada *Outer Model* atau *Measurement Model* ini akan menjelaskan tiga komponen penting dalam menjelaskan hubungan antara indikator dengan variabel lainnya. Tiga komponen tersebut adalah *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

### Model Pengukuran *Inner Model* atau *Structural Model*

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Statistik deskriptif

Tabel 1  
Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GGG	105	2,00	5,00	4.04	1.073
SAP	105	3,00	4,00	3.71	.454

SDM	105	3,00	5,00	4.05	.685
PTI	105	3,00	5,00	3.84	.419
SPIP	105	2,00	5,00	3.68	.814
KLKPD	105	3,00	5,00	4.26	.589
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Olahan, 2018

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan data mengenai variabel-variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi.

## Hasil uji PLS

### Model Pengukuran Dengan Menggunakan *Outer Model*

#### Validitas Model

##### a. *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* menjelaskan bahwa dari uji *Outer Loading (Convergent Validity)* terdapat beberapa indikator yang tidak valid. Pada uji *Outer Loading (Convergent Validity)* akan dinyatakan valid bila nilai *loadingnya* berada di atas 0,50, terlihat pada Tabel 4.8 terdapat indikator yang tidak valid yaitu: PTI2, SAP2, SAP3 dikarenakan nilainya berada dibawah 0,50. Indikator yang tidak valid dibuang dan diuji kembali sehingga seluruh indikator valid semua.

##### b. *Discriminant Validity*

Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan membandingkan antara *discriminant validity* dan *square root of average variance extracted (AVE)*. Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran *cross loading* dengan kontrak. Jika kolerasi kontrak dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran kontrak lainnya, maka kontrak laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada kontrak lainnya. Jika nilai lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara kontrak, maka *discriminant validity* yang baik tercapai (apabila  $AVE > 0,5$ ).

#### Reliabilitas Model

Dalam pengujian reliabilitas dengan SmartPLS digunakan *Composite Reliability*. *Composite Reliability* menggambarkan konsistensi pernyataan-pernyataan dalam instrument. *Composite Reliability* juga dapat digunakan untuk melihat reliabel indicator. *Composite Reliability* dikatakan baik bila memiliki nilai diatas 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015).

### Model Struktural Dengan Menggunakan *Inner Model*

Koefisien determinasi  $R^2$  menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk variable kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Pemerintah Provinsi Riau oleh variabel *good government governance*, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 82,7% sedangkan 17,3% dijelaskan oleh variable lain diluar yang diteliti. Dari angka tersebut, dapat dikategorikan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan skala kuat.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### **Pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil pengujian pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t-statistik sebesar 0,414, nilai ini lebih kecil dari t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel, maka disimpulkan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. Penelitian ini tidak berpengaruh karena belum optimalnya penerapan *good government governance* di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Zeyn (2011), yang menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Efanita (2013) juga menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut hasil penelitian penerapan prinsip-prinsip *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

### **Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t-statistik sebesar 4,042, nilai ini lebih besar dari t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel maka disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penerapan standar akuntansi pemerintahan diterapkan dengan baik, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watim Herawati dan Sinarwati (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil pengujian kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t-statistics sebesar 0,837, nilainya di bawah t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel, maka disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Nugraheta (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah akuntan atau pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sedangkan peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap organisasi

perangkat daerah untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

### **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil pengujian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai *t*-statistik sebesar 16,360, nilainya diatas 1,98. Karena nilai *t*-statistik lebih besar dari *t*-tabel maka disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima. Teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini juga berarti bahwa terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan. Dengan penggunaan teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai pihak untuk mendayagunakan, mengelola, mengakses informasi secara efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurillah (2014) dan Maulidia et.al (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi telah sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini juga menunjukkan bahwa OPD kabupaten polman telah didukung teknologi baik *software* dan *hardware* dalam hal menjalankan kegiatan organisasinya.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Good Government Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian didapatkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan *good government governance* memiliki nilai *t*-statistics sebesar 0,874 yang nilainya di bawah 1,98, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dapat memoderasi hubungan antara *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak.

Sistem pengendalian internal yang memadai dapat berperan dalam memaksimalkan *good government governance*. Dibuktikan dalam teori kontigensi yang menjelaskan bahwa kinerja kepala OPD sebagai pemimpin yang memiliki kendali dan pengaruh atas kinerja para pegawainya untuk menghasilkan laporan keuangan, di mana kepala OPD yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, serta dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga dengan sistem pengendalian internal dan *good governance* yang diterapkan secara maksimal akan berdampak pada peningkatan laporan keuangan OPD Pemerintah Provinsi Riau menjadi semakin andal. Akan tetapi, sistem pengendalian internal OPD Pemerintah Provinsi Riau belum cukup memadai dalam memoderasi hubungan antara *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Penyebabnya adalah belum mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, yaitu keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran oleh setiap pegawai.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian didapatkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *t-statistics* sebesar 1,715 yang nilainya di bawah 1,98, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis keenam ( $H_6$ ) ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Inapty dan Martiningsih (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemprov. NTB.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern belum terlalu efektif dan efisien dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan pada setiap OPD dilingkungan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan mungkin belum konsistennya penerapan SAP dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pegawai dilingkungan pemerintah daerah. Faktor lain yang menyebabkan sistem pengendalian intern tidak bisa mendukung hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan mungkin belum ada wewenang tentang penggunaan standar akuntansi pemerintahan sehingga penerapannya tidak berjalan dengan baik dan tidak konsisten dalam penyusunan laporan keuangan sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian didapatkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *t-statistics* sebesar 2,568 yang nilainya di atas 1,98, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) diterima.

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu tolak ukur yang harus digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian intern mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah. Hal ini berarti Sistem pengendalian intern berperan penting dalam mengontrol kinerja dari staf akuntansi sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem pengendalian intern maka akan ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Staf akuntansi akan memiliki tugas dan wewenang tersendiri sesuai apa yang telah ditetapkan pada sistem pengendalian intern, sehingga tugas staf akuntansi akan jelas dan informasi informasi akan lebih akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang tidak etis yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2011) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang



dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Variabel Moderating**

Hasil pengujian didapatkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern dengan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t-statistics sebesar 1,216 yang nilainya di bawah 1,98, maka ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedelapan ( $H_8$ ) ditolak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sukmaningrum dan Harto (2011), yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berkembang terus menerus, dan regulasi pemerintahan yang mendukung teknologi informasi, mempunyai dampak signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. pemerintah melalui pejabat dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta menganalisis dampaknya pada organisasi, atau dalam kata lain, perubahan yang berasal dari luar organisasi harus diakomodasi dengan baik oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi karena dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Good government governance* tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan antara *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Sistem pengendalian intern pemerintah mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya Melengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang disediakan dan untuk mengurangi subjektivitas dari responden serta melihat konsistensi terhadap hasil jawaban jika dilakukan metode wawancara.
2. Menambah jumlah variabel bebas lainnya yang diprediksi berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agami, A.M. 2006. *Reporting on internal control over financial reporting*. The CPA Journal, Vol 76, No. 11, pp. 32-34.
- Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* ISSN 2302-0164 PP 1-14.
- Donnelly, Mike, John F Dalrymple, & Ivan P. Hollingsworth. 1994. "The Use and Development of Information Systems and Teknologi in Scottish Local Government". *International Journal of Public Sector Management*. Vol. 7 No. 3. Hal 4-15.
- Evicahyadi, Sagung. 2015. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 (2016) : 403-428. ISSN : 2337-3067.
- Fauzan, R., Arfan, M., Basri, H. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Pengendalian Intern Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Teknik Sipil* ISSN 2302-0164 pp 16-27. Universitas Syiah Kuala.
- Fikri, A.M., Inapty, B.A, dan Martaningsih, S.P.RR. 2015, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Herawati, T. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur), *Jurnal STAR- Study & Accounting Research*, Vol XI No.1-2014 ISSN:1693-4482.
- Imhoff, Eugene A., Jr. 1992. The Relation Between Perceived Accounting Quality and Economic Characteristics of the Firm. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 11, issue 2, p. 97-118.
- Indriasari, D. dan Nahartyo, E. 2008. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir). *SNA XI Pontianak*

- Indriasih, D. 2014. *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Kristiawati, Endang. 2015 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas* Vol. III No.3 Desember 2015 Universitas Panca Bhakti Pontianak. ISSN 1979-858X
- Liziana Widari, Sutrisno, 2017, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 5 Edisi 10, Mar 2017, SSN 20886969
- Solikin, I. 2010. *Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan, kualitas informasi akuntansi dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap good government governance dan implikasinya terhadap kinerja keuangan*. Prosiding seminar nasional. ISBN: 978-602-17225-0-3s.
- Sudiarianti, Made, Ni, 2015. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. SNA 18.
- Zeyn, E., 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan".